



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Tri Asti Isnariani
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 171038

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 292 m<sup>2</sup>/168 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 715 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m<sup>2</sup>/28 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 388.000.000

1. MOTOR, HONDA ALL NEW VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 32.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 124.100.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.924.100.000

**III. HUTANG**

Rp. 676.880.943



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.247.219.057

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.